

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Agus, Ery Priyono. Bahan Kuliah Metodologi Penelitian, Semarang: Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, 2004.
- Amirudin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004.
- Budiono, Abdul R. Hukum Perburuhan. Jakarta: PT.Indeks, 2009.
- Farianto, Willy. Pola Hubungan Hukum Pemberi Kerja dan Pekerja: Hubungan Kerja Kemitraan & Keagenan, Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Hadi, M. Subhan. Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Pengadilan, cetakan ke-7, Jakarta: Kencana, 2021.
- Hartono, Darmianto. Economic Analysis of Law atas Putusan PKPU tetap, cetakan 1, Lembaga Studi Hukum dan Ekonomi, Jakarta: Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, 2009.
- Hernawan, Ari. Penyelesaian Sengketa Hubungan Industrial. Yogyakarta: UII Press, 2018,
- Isra, Saldi. Pengesahan Fungsi Legislasi, Menguatnya Model Legislasi Parlementer Dalam Sistem Presidensial Indonesia, Jakarta: Rajawali Press, 2010.
- Khakim, Abdul. Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia. Cetakan ke-4 Edisi Revisi, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014.
- Latif, Abdul. dkk, Buku Ajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. Yogyakarta: Total Media, 2009.
- Lontoh, Rudhy A. (ed.). Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pilit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Bandung: Alumni, 2001.
- Rahardjo, Satjipto. Ilmu Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012.
- Rasyid, Abdul Saliman, Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus. Jakarta: Kencana, 2022.
- Rusli, Hardijan. Hukum Ketenagakerjaan. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.
- Sampara, Said dkk, Pengantar Ilmu Hukum, Yogyakarta: Total Media, 2011.

- Sidharta. *Karakteristik Penalaran Hukum Dalam Konteks Keindonesiaan*, Bandung: Alumni, 2006,
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamuji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2005.
- Sutiyoso, Bambang. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, cetakan pertama, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2006.
- Algra.N.E. *Inleiding tot Het Nederlands Privaatrecht*, Groningen: Tjeenk Willink, 1974.
- Muljadi, Kartini. *Penyelesaian Utang Piutang melalui Kepailitan dan PKPU*. Bandung: Alumni, 2013.
- Hartini, Rahayu. *Penyelesaian Sengketa kepailitan di Indonesia Dualisme Kewenangan Pengadilan Niaga & Lembaga Arbitrase*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Mahmud, Peter Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.

## **B. Jurnal dan Publikasi**

- Anisah, Siti. “Alternatif Penyelesaian Utang Piutang dalam Rangka Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang”, *Jurnal Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia*, Vol. 1. No. 1.
- Asy’ari, Syukri. dkk, “Model dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang (Studi Putusan Tahun 2003-2012)”, *Jurnal Konstitusi*, Volume 10, Nomor 4, Desember 2013.
- Budi, Fadzlun Sulisty Nugroho. “Sifat Keberlakuan Asas Erga Omnes Dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi”, *Volume 2 - NO. 2, Gorontalo Law Review*, Oktober 2019.
- Hadi, M. Subhan. “Fenomena Hukum Pengajuan Kepailitan Terhadap Pengusaha Oleh Pekerja Karena Hak Pekerja Yang Tidak Dibayar Pengusaha”, *Jurnal hukum & pembangunan*, 50 No. 2, 2020.

Hakim, Muchamad Lutfi dan Rasji, “Penerapan Asas Erga Omnes dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018 dikaitkan dengan Asas Negative Legislator,” *Jurnal Hukum Adigama* 1, no. 2, 2019.

Harun, Refly. “Implementasi Putusan MK Terhadap Proses Legislasi”, dalam Ceramah Perancangan Peraturan Perundang-undangan dengan tema “Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Proses Legislasi”, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Jumat, 3 Desember 2010.

Lumbuun, Topane Gayus. “Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi oleh DPR RI”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol.6 No.3 September 2009.

Martitah, “Mahkamah Konstitusi dari Negativ Legislature ke Positive Legislature”, Jakarta: Kompas, 2013.

Siahaan, Maruarar. “Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Penegakan Hukum Konstitusi”, *Jurnal Hukum* No.3 Vol. 16 Juli 2009.

### **C. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek voor Indonesie).

Kitab Undang-undang Hukum acara Perdata (Reglement Op De Rechtsvordering).

Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279)

Undang-undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316)

Undang-undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356)

Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443)

Undang-undang No. 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398)

Undang-undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)

Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 6 Tahun 2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang.

Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 3 Tahun 2019 tentang Produk hukum Mahkamah Konstitusi.

Peraturan DPR No. 13 tahun 2016 tentang tata cara penyusunan program legislasi nasional.

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 1 Tahun 2014.

#### **D. Putusan**

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 67/PUU-XI/2013 perihal Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

#### **E. Internet**

Data Kementerian Ketenagakerjaan, “Perselisihan hubungan industrial tahun 2020-2022”, diakses melalui. <https://satudata.kemnaker.go.id/data/kumpulan-data/1803> .

Heriani, Fitri Novia. “Melihat Posisi Pekerja dalam Proses PKPU dan Kepailitan” (Selengkapnya dapat dilihat dalam pranala sebagai berikut: <https://www.hukumonline.com/berita/a/melihat-posisi-pekerja-dalam-proses-pkpu-dan-kepailitan-lt6566a93044d18> )

Yitawati, Krista. “Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial melalui Mediasi, Yustisia Merdeka” , Jurnal Ilmiah hukum, Volume 3, No.1, diakses melalui: [https://unmermadiun.ac.id/repository\\_jurnal\\_penelitian/Krista%20Yitawati/Penelitian/JURNAL%20NASIONAL%20YUSTISIA/JURNAL%20YUSTISIA%20MARET%202017.pdf](https://unmermadiun.ac.id/repository_jurnal_penelitian/Krista%20Yitawati/Penelitian/JURNAL%20NASIONAL%20YUSTISIA/JURNAL%20YUSTISIA%20MARET%202017.pdf)